

- Otsu, K. (1998). "Japan". In Cogan J.J. and Ray Derricott (ed). *Citizenship Education for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. England: nfer, QCA.
- _____. (1999). *Citizenship Education in The Curriculum: An International Review*. England: nfer, QCA.

Tinjauan Buku:

Survei Awal Kepustakaan: PERBANDINGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA:

- John J. Cogan, Paul Morris dan Murray Print (eds.), *Civic Education in the Asia-Pacific Region: Case Studies Across Six Societies*, (New York: Routledge Falmer, 201 pp) ISBN: 0-415-93213-0.
- W. O. Lee, David L. Grossman, Kerry J. Kennedy, dan Gregory P. Fairbrother (eds.), *Citizenship Education in Asia and the Pacific Concepts and Issues* (Hongkong: Comparative Education Research Centre (CERC) and Kluwer Academic Publishing, 2004, 313pp) ISBN: 962-8093-59-2.
- Viola Espinola (ed.), *Education for Citizenship and Democracy in a Globalized World: A Comparative Perspective*, (Washington: Inter-American Development Bank, 2005, 95pp).

Oleh: Samsuri*)

Bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan oleh negara-negara di seluruh belahan dunia? Sebuah penelitian longitudinal tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara, yang dilakukan oleh sejumlah peneliti di bawah koordinasi *The International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA), telah berhasil memetakan dinamika dan topik apa saja yang dikembangkan dalam kajian pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara. Sekitar 1994 hingga 1997, IEA melakukan dua fase penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan. Fase pertama, berupa penelitian bersifat kualitatif mengenai pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di 24 negara (masing-masing: Australia, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kolombia, Siprus, Republik Ceko, Inggris, Finlandia, Jerman, Yunani, Hong Kong, Hongaria, Israel, Italia, Lithuania, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Slovenia, Swiss, dan Amerika Serikat) (Torney-Purta, Schwille, Amadeo, eds., 1999). Fase pertama mengkaji dokumen-dokumen dan wawancara para pakar yang ada di 24 negara tadi. Topik yang dikaji

*) Samsuri Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE Universitas Negeri Yogyakarta

ialah mengenai lembaga-lembaga demokrasi, termasuk pemilihan umum, hak-hak individual, identitas nasional, partisipasi politik dan menghargai keanekaragaman etnik dan politik.

Fase kedua, penelitian bersifat kuantitatif dilakukan terhadap para guru, para siswa dan (kepala) sekolah menengah tingkat pertama (SMP) tentang kajian pendidikan kewarganegaraan di 28 negara (Torney-Purta, Lehmann, Oswald dan Schulz, 2001). Penelitian fase kedua dilakukan melalui tes dan survei kepada para siswa tingkat usia SMP (umur 14 tahun), kuesioner tentang pendidikan kewarganegaraan kepada para guru dan sekolah. Baik pada fase pertama maupun fase kedua, ditemukan sejumlah keunikan, persamaan-persamaan dan perbedaan di masing-masing negara. Namun, secara umum terdapat *common senses* tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada generasi muda, terutama melalui jenjang pendidikan formal di sekolah.

Dua fase kajian pendidikan kewarganegaraan oleh IEA tersebut, meskipun terkesan *Fropasentris*, karena di antara sampelnya ada mayoritas dari negara-negara di Benua Eropa, namun tetap memberikan banyak sumbang dan inspirasi bagi analisis-analisis serupa di negara-negara yang belum dibahas IEA. Lalu, bagaimanakah kajian serupa di kawasan Asia dan Pasifik serta Amerika Latin?

Buku *Civic Education in the Asia-Pacific Region* (Cogan, Morris, dan Print, (eds.), 2002) dan *Citizenship Education in Asia and the Pacific* (Lee, Grossman, Kennedy dan Fairbrother, (eds.), 2004) memberikan gambaran mendalam terhadap fenomena pendidikan kewarganegaraan di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik. Di dalam *Civic Education* kajian pendidikan kewarganegaraan difokuskan kepada pengalaman di negara bagian New South Wales (Australia), dua sekolah di Hong Kong, tinjauan di Jepang, satu studi kasus di Taiwan, penelitian di tiga sekolah di Thailand, dan situasi tiga sekolah terpilih di American Midwest. Dalam buku ini, Cogan, Morris dan Print sebagai penyunting mendefinisikan *civic education* sebagai "the formation through the process of schooling of the knowledge, skills, values, and dispositions of citizens" (p. 4). Tiga bagian (chapter) dari buku ini, pertama, memaparkan basis literatur berkaitan dengan *civic education* dengan pertanyaan-pertanyaan: Apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah (tertulis dan tak tertulis) yang bertalian dengan *civic education* di sekolah-sekolah? Bagaimana tujuan-tujuan kebijakan diterapkan di dalam kurikulum formal/informal di sekolah-sekolah? Bagaimanakah implementasi *civic education* dalam praktik yang berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan? Bagian kedua buku *Civic Education* membahas studi-studi kasus di masyarakat enam negara. Bagian ketiga buku, kesimpulan, memberikan analisis sangat rinci dan

ringkasan atas semua tanggapan terhadap tiga kerangka pertanyaan yang diajukan. Tabel-tabel dan gambar digunakan untuk menampilkan data pembaca diberikan wawasan yang jelas terhadap perbedaan-perbedaan, kesamaan-kesamaan, dan hal kontras antara dan di antara keenam kasus yang dipilih.

Berbeda dengan kajian buku *Civic Education*, buku *Citizenship Education* memperluas cakupan kajiannya di China, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Kepulauan Solomon, Taiwan dan Vanuatu. Buku ini banyak memberikan gambaran bagaimana nilai-nilai Asia, khususnya, mempengaruhi konsep Kewarganegaraan Asia. Pada bagian pertama, perdebatan konseptual tentang *citizenship* secara mendalam dibahas dalam tiga artikel. Meskipun ada uraian mengenai *citizenship education* di Malaysia, Vanuatu, dan Indonesia, namun sekilas setelah membaca buku ini terkesan bahwa yang menonjol paparannya ialah *citizenship education* perspektif Konfusian (baik di China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, maupun di Jepang dan Korea Selatan), meskipun buku ini ingin mendekati dari perspektif lainnya seperti dari Islam, humanis, global, pribumi, kultural, politik dan komparatif. Analisis reflektif dari para editor tentang spiritualitas, harmoni dan individualitas tentang *Asian Citizenship* mengokohkan pentingnya kearifan lokal terhadap persoalan pendidikan kewarganegaraan. Pilihan antara Konstruksi pra-kolonial dataukah pasca-kolonial ketika melihat *citizenship education* dengan perspektif Asia, menjadikan buku ini penting untuk dicermati.

Sebagaimana kedua buku sebelumnya tentang pendidikan kewarganegaraan di Asia dan Pasifik, buku *Education for Citizenship and Democracy in a Globalized World* pada awalnya merupakan kumpulan karangan yang disajikan sebagai bagian seri diskusi kertas kerja yang diselenggarakan oleh *the Regional Policy Dialogue* dari Inter-American Development Bank. Buku ini menyajikan secara konseptual dan praktik *civic education* di dalam sistem pendidikan di negara-negara industri maju di Eropa dan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Dalam *Civic Education* di negarai industri maju, Audrey Osler dan Hugh Starkey menyodorkan persoalan-persoalan konseptual terhadap implementasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Osler dan Starkey mengajukan sejumlah konsep pokok pendidikan kewarganegaraan yang perlu dikembangkan di sekolah, seperti: *democracy; diversity; globalization; sustainable development; empire, imperialism, power; prejudice, discrimination, racism; migration; identity/diversity; multiple perspectives; dan, patriotism and cosmopolitanism* (p. 20). Fernando Reimers dan Eleonora Villegas Reimers membahas program-program dan kebijakan *education for*

citizenship and democracy di sekolah-sekolah menengah pertama di negara-negar Amerika Latin dan Karibia. Pengalaman-pengalaman khusus *citizenship education* di negara-negara Amerika Latin lainnya, seperti Chile dan Colombia, juga turut dibahas meskipun kurang intensif seperti dalam paparan panjang Osler dan Starkey. Namun, paparan yang ringkas dari Christian Cax terhadap pengalaman di Chile adalah menarik. Cax mencoba menarik garis pendidikan kewarganegaraan dari pengalaman reformasi pendidikan 1990an di Chile mulai dari *civic education* menuju *citizenship education* (p. 83). Harus diakui bahwa selama ini sebagian besar pendidikan kewarganegaraan lebih berorientasi kepada *civic education* daripada *citizenship education* (secara konseptual perbedaan ini dibahas oleh David Kerr (1999) sebagaimana dimuat dalam artikel Udin S. Winataputra pada *Acta Civicus* edisi ini).

Pengalaman pendidikan kewarganegaraan di dunia seperti telah dipaparkan secara ringkas, memberikan gambaran bahwa betapa kompleksnya persoalan-persoalan pendidikan kewarganegaraan, baik di negara-negara maju dalam pengalaman demokrasi maupun di negara-negara yang masih dalam proses transisi demokrasi. Persoalan ini memberikan tantangan bagi komunitas pendidikan kewarganegaraan, khususnya di Indonesia, untuk terus bercermin dan membenahi diri sehingga cita ideal pendidikan kewarganegaraan benar-benar terwujud. Semoga.